



Representasi Hutan dalam Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan melalui Sistem Transitivitas

Adam Ibnu Aulia¹, Zulprianto², Fajri Usman³

^{1,2,3}Universitas Andalas, Indonesia

E-mail: adamibnuaulia@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-03-07 Revised: 2026-04-13 Published: 2026-05-13	<p>This study adopts a descriptive-qualitative approach. Specifically examines the representation of forests in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 5 of 2025 concerning the Control of Forest Areas. The study reveals the transitivity structure of the text, the distribution of agency, and the representation of institutional domination through Halliday's (2014) theory of the transitivity system and Fairclough's theory of domination. The data source of this study consists of Chapters I to IV of the text of Perpres No. 5/2025, and the data are clauses containing the lexeme 'forest' that undergo transitivity processes. The data were collected through purposive-criterion sampling and concordance tracing (Find/Ctrl+F), then the identified clauses were isolated into data tables for qualitative-interpretive analysis. The corpus contains 43 transitivity processes, 55 participants, and 39 circumstances. The most frequent process is the material process, with 29 occurrences or 67.44% of the total processes. The text is predominantly constructed around material verbs that represent administrative action, intervention, and implementation. The most frequent participant is Range, with 15 occurrences or 25.00% of all occurrences. The distribution of circumstances is dominated by manner, with 13 occurrences or 23.08% of all occurrences. These findings show that the text tends to represent institutional control over forests, while forests are more often positioned as objects of management and classification rather than as active ecological subjects.</p>
Keywords: <i>Systemic Functional Linguistics;</i> <i>Transitivity Systems;</i> <i>Dominance Representation;</i> <i>Discourse Analysis.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-03-07 Direvisi: 2026-04-13 Dipublikasi: 2026-05-13	<p>Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Secara khusus, penelitian ini menelaah representasi hutan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Studi ini mengungkap struktur transitivitas teks, distribusi agensi, dan representasi dominasi institusional melalui teori sistem transitivitas Halliday (2014) dan teori dominasi Fairclough. Sumber data penelitian ini adalah Bab I hingga Bab IV teks Perpres No. 5/2025, dan data penelitian ini adalah klausa-klausa berleksem 'hutan' yang mengalami proses transitif. Data dikumpulkan melalui <i>purposive-criterion sampling</i> dan penelusuran konkordansi (Find/Ctrl+F), lalu klausa temuan diisolasi ke dalam tabel data untuk dianalisis secara kualitatif-interpretatif. Korpus memuat 43 proses transitif, 55 partisipan, dan 39 sirkumstan. Proses terbanyak adalah proses material dengan 29 kali kemunculan atau 67,44% dari total proses. Teks secara dominan dibangun di sekitar verba material yang merepresentasikan aksi, intervensi, dan pelaksanaan yang bersifat administratif. Partisipan terbanyak adalah Range dengan 15 kali kemunculan atau 25,00% dari keseluruhan kemunculan. Distribusi sirkumstan didominasi oleh manner sebanyak 13 kali atau 23,08% dari seluruh kemunculan. Temuan ini memperlihatkan bahwa teks cenderung merepresentasikan kontrol institusional atas hutan, sedangkan hutan lebih sering diposisikan sebagai objek pengelolaan dan klasifikasi, bukan sebagai subjek ekologis yang aktif.</p>
Kata kunci: <i>Linguistik Fungsional Sistemik;</i> <i>Sistem Transitivitas;</i> <i>Representasi Dominasi;</i> <i>Analisis Wacana.</i>	

I. PENDAHULUAN

Tata bahasa adalah teori pengalaman; teori yang lahir dari tindakan, dan karena itu menjadi pedoman bagi tindakan, dan tata bahasa adalah *metalanguage* yang kita hidupi sehari-hari (Halliday, 2001, hal. 195). Konseptualisasi entitas alam dalam diskursus bahasa dan budaya berpengaruh pada keberlanjutan ekosistem, dan pada pengguna bahasa yang hidup dalam ekosistem itu (Halliday, 2001, hal. 195).

Tatabahasa yang ekologis menciptakan sistem pikiran yang merefleksikan interdependensi manusia dengan alam, menggantikan tatabahasa lama yang mementingkan dominasi dan kepemilikan manusia akan alam (Halliday, 2001, hal. 198).

Sentralisme manusia secara inheren memosisikan manusia sebagai satu-satunya agen utama, sehingga hal di luar spesies manusia direduksi menjadi sebatas instrumen fungsional

untuk mendukung eksistensi manusia semata. Dalam pandangan ini, alam adalah sumber daya yang subordinat di hadapan agenda-agenda pembangunan, ia tidak dipandang memiliki hak dan nilai intrinsik, sehingga manusia adalah satu-satunya titik acuan utama di alam semesta (Fill, 2001, hal. 275). Sentralisme manusia bersifat dominan dan eksploitatif, dan ia telah membawa manusia ke peradaban industrialis, dan pada akhirnya menuju kehancuran ekologis (Stibbe, 2021, hal. 9).

Analisis transitivitas dalam kerangka studi wacana dan kajian representasi dominasi dapat mengungkap bagaimana pembuat teks merepresentasikan pandangan mereka dalam aspek ekologis. Stibbe (2021) mengatakan bahwa analisis transitivitas sebagai sebuah kerangka analisis dapat menunjukkan “cerita” implisit ekologis dalam sebuah teks melalui fitur-fitur linguistik yang ada di dalamnya. Melalui kerangka teoritis sistem transitivitas, penulis dapat mengidentifikasi bagaimana lingkungan direpresentasi dalam undang-undang peraturan alam. Teori analisis transitivitas Halliday merupakan seperangkat teori yang melihat bagaimana proses, partisipan, dan sirkumstan direpresentasikan – siapa yang melakukan apa, apa dan siapa saja yang terkena dampaknya, dan entitas apa yang secara gramatikal bersifat agentif atau sama sekali pasif. Melalui teori ini, kita dapat membuat klaim yang sistematis; apakah di dalam teks-teks legal manusia selalu menjadi partisipan yang dominan dan alam selalu menjadi partisipan yang pasif?

Asumsi awal dari penelitian ini adalah teks Perpres No. 5/2025 tentang Penertiban Kawasan adalah teks yang eko-ambivalen; yaitu teks yang merepresentasi melalui sistem transitivitas dengan agensi partisipan yang asimetris. Mengaplikasikan teori transitivitas dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana bahasa hukum mengkonstruksi hubungan antara manusia dengan entitas non-manusia, dan apakah tanggungjawab perlindungan yang praktis direpresentasi atau sama sekali dikaburkan. Karena dokumen ini berurusan langsung dengan hutan, isu-isu perlindungan, dan keberlanjutan, maka teks ini sangat relevan untuk dianalisis. Fitur-fitur linguistik yang berkaitan dengan sistem transitivitas entitas-entitas ekologis dalam teks secara langsung merepresentasi hubungan antara pengalaman manusia, alam, kemasyarakatan, dan seluruh lingkup elemen lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-kualitatif dengan fokus pada analisis gramatikal pada teks Perpres No. 5/2025. Karakteristik penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang secara prosedur terbuka (*open ended*), tidak numerik dan data dianalisis menggunakan prosedur yang tidak statistikal, sebagai contohnya adalah analisis kualitatif sebuah konten dari dokumen atau transkrip tertentu (Dörnyei, 2007, hal. 25). Salah satu karakteristik utama penelitian kualitatif adalah hampir pada setiap penelitian, teks diawali dengan emergent nature – atau yang peneliti maksud adalah sifat atau kecenderungan awal yang terobservasi dan menjadi asumsi awal penelitian. Aspek desain penelitian tidak ditetapkan secara ketat; penelitian bersifat terbuka dan fleksibel, penelitian bersifat responsif tergantung dengan detail-detail, peluang, dan temuan-temuan baru yang mungkin saja muncul selama proses penelitian (Dörnyei, 2007, hal. 37).

Berdasarkan tipologi data, materi data yang digunakan pada penelitian ini disebut sebagai data bahasa dan data kualitatif, yaitu sampel-sampel bahasa yang dikumpulkan secara spesifik untuk kepentingan analisis linguistik (Dörnyei, 2007, p. 19). Sumber data pada penelitian ini adalah dokumen Perpres No. 5/2025. Sampel data dari penelitian ini adalah klausa undang-undang yang mengandung leksikon “hutan” di dalam Perpres No. 5/2025.

Pada penelitian kualitatif, untuk bisa mencapai saturasi, dibutuhkan strategi *sampling* yang spesifik, salah satunya adalah *purposive sampling*. Dalam menentukan strategi dan rencana sampling, peneliti harus memikirkan *cost* sumber daya, dan yang paling penting adalah tingkat saturasi data. Jika sebuah data homogen dan kohesif, maka semakin cepat data akan tersaturasi, dan semakin mengerucut *scope* penelitian yang dilakukan (Dörnyei, 2007, p. 127). Untuk mencapai itu, peneliti memberlakukan strategi sampel *criterion sampling* atau pengumpulan sampel data berdasarkan seperangkat kriteria spesifik yang ditentukan oleh peneliti dalam konteks penelitian ini adalah klausa yang mengandung leksem hutan.

Secara teknis, peneliti menggunakan fitur Ctrl + F (fitur “*find*”) dalam Microsoft Word untuk menemukan klausa yang mengandung leksem ‘hutan’ pada dokumen Perpres No.5/2025. Melalui fitur Ctrl + F tersebut, peneliti dapat mengisolasi klausa dengan konkordansi leksem ‘hutan’. Dengan mengaplikasikan *purposive-*

criterion sampling, penelitian secara spesifik dikonstruksi di sekitar sampel-sampel klausa yang mengandung leksem 'hutan'. Adapun data pada penelitian ini adalah klausa-klausa yang mengandung leksem 'hutan' di dalamnya. Lebih jauh, data klausa yang dianalisis adalah klausa yang proses transitifnya paling dekat dan secara langsung memengaruhi leksem 'hutan' sebagai partisipan dalam jaringan struktur transitif klausa. Sumber data dari penelitian ini adalah Bab I sampai Bab VII dokumen Perpres No.5/2025. Jumlah total klausa pada dokumen Perpres No.5/2025 yang diisolasi berdasarkan kemunculan leksem 'hutan' adalah sebanyak 21 klausa, dengan 30 kemunculan leksem. Jumlah tersebut adalah klausa dengan tingkat kedekatan yang tinggi antara leksem 'hutan' dengan proses transitif yang berlangsung (mengandung leksem 'hutan' sebagai partisipan, maupun sirkumstan pada klausa).

Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah peneliti mengunduh dokumen Perpres No. 5/2025 melalui website https://jdih.kehutan.go.id/new2/uploads/files/PERPRES_5_2025.pdf. Langkah kedua, linear dengan strategi *purposive-criterion sampling*, peneliti menggunakan fitur ctrl + F (Find) di MS Word. Langkah ketiga, peneliti mengetik keyword leksikon 'hutan'. Pada kata kunci 'hutan', akan muncul klausa-klausa yang memuat leksem tersebut. Langkah keempat, peneliti mengisolasi setiap klausa yang mengandung leksem 'hutan' ke dalam sebuah tabel data untuk kemudian dianalisis pada level klausa. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pengisolasian klausa hanya pada klausa yang mengandung leksem 'hutan', dan 'hutan' sebagai partisipan atau sirkumstan dalam struktur transitif harus mengalami dampak proses, atau yang kemunculannya dekat dengan proses transitif yang berlangsung dalam klausa. Kemudian data dipresentasikan berdasarkan nomor bab, pasal dan ayatnya, sebagai contoh; Bab 1, Pasal 1, ayat 1, poin 1, akan dipresentasikan dengan cara; B.1, P.1, A.1, p.1. Beberapa pasal tidak memiliki ayat turunan, sehingga presentasi akan terhenti sampai ke poin pasal seperti contoh berikut; B.1, P.1.

Tahap analisis data didasarkan pada dua permasalahan penelitian; yang pertama adalah apa saja bentuk sistem transitivitas teks Perpres No. 5/2025, bagaimana sistem agensi hutan terepresentasi melalui sistem transitivitas dari teks tersebut. Langkah pertama, berdasarkan data klausa yang telah diekstrak dan diisolasi ke dalam daftar tabel, peneliti menganalisis klausa-

klausa temuan tersebut dengan mengaplikasikan teori sistem transitivitas; mengklasifikasi apa saja proses, aktor, partisipan, dan sirkumstan pada klausa, untuk melihat bentuk-bentuk sistem transitivitas. Kemudian klausa-klausa yang telah dianalisis dikelompokkan berdasarkan bentuk prosesnya.

Berdasarkan temuan data, penulis menemukan sejumlah klausa dengan partisipan yang mengalami elipsis, yakni partisipan yang secara fungsional tetap berfungsi dalam karingan konfigurasi transitivitas klausa namun tidak diekspresikan secara eksplisit di struktur permukaan klausa. Partisipan elipsis dimunculkan dan dianalisis untuk melihat secara lengkap bagaimana teks hukum mendistribusikan agensi partisipan yang fungsional, walaupun tidak muncul pada klausa. Mengidentifikasi partisipan yang mengalami elipsis digunakan untuk memperkuat analisis kualitatif, agar menjernihkan pembacaan terhadap pola representasi agensi hutan, dan bagaimana relasi antar aktor, proses, dan partisipan dalam Perpres No. 5/2025. Lebih jauh, karena partisipan elipsis tidak direalisasikan secara eksplisit dalam klausa, partisipan elipsis tidak dimasukkan ke dalam perhitungan kuantitatif pada tabel hitungan partisipan, melainkan hanya dipakai sebagai pendukung elaborasi analisis yang bersifat kualitatif.

Langkah kedua, setelah klausa dikelompokkan berdasarkan kategorisasi proses-prosesnya, kemunculan entitas alam (hutan) sebagai partisipan di dalam klausa dianalisis berdasarkan peran agentifnya untuk melihat bagaimana undang-undang mengkonstruksi sistem agensi-partisipan di dalam Perpres No. 5/2025. Pada tahap kedua ini, peneliti mengelaborasi temuan dengan pendekatan teori dominasi Fairclough untuk mengupas konstruksi representasi dominasi institusional atas entitas ekologi dalam undang-undang terkait.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan total 43 proses dengan konkordansi leksem "hutan". Proses dengan frekuensi terbanyak adalah proses material dengan frekuensi kemunculan sebanyak 29 kali (67,44%), proses relasional menempati posisi kedua dengan frekuensi 11 kali (25,58%), dan proses verbal sebanyak 3 kali (6,98%).

Tabel 1. Distribusi Proses

No.	Tipe Proses	Frekuensi	Persentase
1	Material	29	67,44
2	Relasional	11	25,58
3	Verbal	3	6,98
Total		43	100

Kecendrungan distribusi proses ini menunjukkan bahwa teks Perpres No. 5/2025 secara dominan dibangun di sekitar proses material (67,44%), lalu disusul proses relasional (25,58%) dan verbal (6,98%). Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa pengalaman yang dikonstruksi teks bukan terutama pengalaman ekologis, melainkan pengalaman tindakan, intervensi, pelaksanaan, dan penertiban yang bersifat administratif. Dominasi proses material menandakan bahwa hutan dimasukkan ke dalam logika tata kelola fisik dan operasionalisasi, sedangkan kehadiran proses relasional dan verbal memperkuat fungsi klasifikasi, penetapan, dan pendefinisian terhadap 'hutan'. Dengan demikian, pada level proses, representasi dominasi tampak melalui sentralisasi tindakan institusional atas entitas hutan.

Temuan ini linear dengan penelitian Yahya dan Roselani (2024) yang menunjukkan prevalensi signifikan proses material pada dokumen kebijakan iklim, sekaligus memperlihatkan titik fokus teks pada tindakan dan peristiwa. Dalam konteks penelitian ini, dominasi proses material memperkuat pembacaan bahwa pengalaman tentang hutan dikonstruksi terutama melalui intervensi, pelaksanaan, dan penertiban yang bersifat administratif.

Tabel 2. Distribusi Partisipan

No.	Tipe Partisipan	Frekuensi	Persentase
1	Actor	7	12,73
2	Goal	12	21,82
3	Range	14	25,45
4	Carrier	4	7,27
5	Attribute	6	10,91
6	Token	5	9,09
7	Value	5	9,09
8	Verbiage	2	3,64
Total		55	100

Distribusi partisipan memperlihatkan bahwa *Range* (25,45%) dan *Goal* (21,82%) menjadi posisi yang paling dominan, sedangkan *Actor* hanya muncul 12,73%. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa hutan lebih sering direpresentasikan sebagai

ekstensi verba proses, sasaran tindakan, atau objek yang dikenai perlakuan, bukan sebagai partisipan agentif yang aktif. Pada saat yang sama, kemunculan *Carrier*, *Attribute*, *Token*, dan *Value* memperlihatkan bahwa hutan juga sering dimasukkan ke dalam relasi identifikasi, atribusi, dan klasifikasi. Secara keseluruhan, distribusi ini menguatkan pembahasan bahwa dominasi institusional tidak hanya bekerja melalui tindakan langsung, tetapi juga melalui penataan kategoris yang menempatkan hutan sebagai objek pengelolaan, penamaan, dan penguasaan.

Tabel 3. Distribusi Sirkumstan

No.	Tipe Sirkumstan	Frekuensi	Persentase
1	<i>Manner</i>	13	33,33
2	<i>Location</i>	9	23,08
3	<i>Cause</i>	8	20,51
4	<i>Accompaniment</i>	1	2,56
5	<i>Role</i>	4	10,26
6	<i>Matter</i>	4	10,26
Total		39	100

Distribusi sirkumstan didominasi oleh *Manner* (33,33%), lalu *Location* (23,08%) dan *Cause* (20,51%). Pola ini menunjukkan bahwa teks sangat menekankan cara, mekanisme, prosedur, logika konteks ruang dan waktu, serta alasan pelaksanaan tindakan. Artinya, pengalaman yang dibangun di dalam teks diarahkan pada bagaimana tindakan dilakukan, di mana tindakan diberlakukan, dan untuk tujuan atau sebab apa tindakan itu dijustifikasi. Dalam kerangka representasi dominasi, dominasi sirkumstan memperkuat orientasi administratif-prosedural, karena hutan lebih sering hadir sebagai ruang pengaturan, latar penertiban, dan objek yang diprosedurkan. Dengan demikian, sirkumstan dalam teks tidak netral, melainkan ikut menopang representasi dominasi institusional atas entitas hutan.

Dalam kerangka Halliday, pengalaman hadir sebagai '*flow of events*'; maka, konfigurasi susunan proses, partisipan, maupun sirkumstan bukan sekadar pilihan gramatikal yang bersifat stilistik, melainkan adalah cara teks merepresentasi entitas-entitas. Secara singkat posisi agentif entitas alam (hutan) dalam teks kebijakan harus dibaca sebagai sebuah konstruksi wacana. Cara teks memosisikan entitas alam secara langsung berkaitan dengan cara teks mendistribusikan kekuatan agensi.

B. Pembahasan

1. Representasi Entitas Hutan dan Dominasi Institusi Negara dalam Perpres No.5/2025

Struktur transitivitas pada klausa tidak bisa dipandang sebagai pilihan gramatikal yang spontan; ia adalah mekanisme konstruktif yang merepresentasi kekuatan dan relasi setiap partisipan, yang disusun di dalam teks. Dari pemetaan data, terlihat bahwa, terutama melalui proses material, hampir seluruhnya digerakkan oleh aktor institusi atau manusia; 'Pemerintah Pusat', 'Satgas', 'Pelaksana', 'Pengarah', dan 'Presiden', direalisasikan melalui verba material seperti 'melakukan', 'menertibkan', dan 'melaksanakan'. Entitas hutan diletakkan di dalam konfigurasi frasa nomina 'penertiban', 'penguasaan kembali', 'kawasan' dan 'pemulihan aset'. Di waktu yang sama, beberapa konstruksi pasif menempatkan kawasan hutan sebagai entitas yang 'ditetapkan', 'dipertahankan', dan 'dikuasai', sehingga konstruksi kontrol yang bersifat administratif terhadap hutan sangat menonjol.

Zhu (2024) menemukan bahwa konstruksi pasif dan nominalisasi secara signifikan memengaruhi wacana lingkungan karena keduanya dapat menyamarakan aktor dan mentransformasikan proses menjadi entitas nominal yang abstrak. Dalam data penelitian ini, bentuk seperti ditetapkan, dipertahankan, serta nomina seperti penguasaan dan penertiban memperkuat pengaburan agensi manusia/institusi di balik tindakan atas hutan.

Penulis menemukan konfigurasi bentuk yang paling menonjol pada populasi seluruh data; aktor (institusi/manusia) + proses material (verba) + Range/Goal (nominalisasi verba dalam konteks tata kelola). Pusat gramatikal verba terkonsentrasi pada nomina 'penguasaan kawasan', dan dilakukan oleh perangkat negara, yaitu 'Pemerintah Pusat', 'Satgas', 'Pelaksana', dan 'Pengarah'. Secara diskursif, penulis membahas lima data yang merepresentasi logika kekuasaan dan kontrol.

Tabel 4. Data B.1, P.1, A.9

guna	(pemerintah pusat)	menyelamatkan	penguasaan Kawasan Hutan
Sirkumstans: (elipsis): <i>Purpose</i>	Partisipan: Aktor (elipsis)	Proses: Material	Partisipan: <i>Goal</i>

Tabel 5. Data B.1, P.1, A.9

Dan (guna)	(pemerintah pusat)	menertibkan	penguasaan Kawasan Hutan
Sirkumstans (elipsis): <i>Purpose</i>	Partisipan: Aktor (elipsis)	Proses: Material	Partisipan: <i>Goal</i>

Dua data klausa di atas muncul pada Bab 1, Pasal 1, Ayat 9, ayat lengkapnya sebagai berikut; 'guna (pemerintah pusat) menyelamatkan penguasaan Kawasan Hutan' 'dan (guna) (pemerintah pusat) menertibkan penguasaan Kawasan Hutan'. Konfigurasi transitif kedua klausa adalah sebagai berikut; aktor elipsis = 'pemerintah pusat'; verba proses material = 'menyelamatkan' dan 'menertibkan', kemudian *Goal* = 'penguasaan Kawasan Hutan'; dan sirkumstan = 'guna' (*purpose*).

Pada kedua data, objek yang mengalami verba material 'penyelamatan' bukanlah hutan sebagai entitas ekologis yang independen, yang menjadi objek penyelamatan adalah nomina 'penguasaan' pada struktur frasa nomina 'penguasaan kawasan hutan'. Kita dapat melihat bahasa mengkonstruksi relasi kekuasaan yang bersifat administratif sebagai prioritas utama di dalam klausa; hutan hadir sebagai pewatas; ia adalah bagian atau domain yang harus ditertibkan kepemilikannya, bukan sebagai subjek ekologi yang memiliki agensi, yang seharusnya independen.

Tabel 6. Data B.4, P.11, A.1

(Pelaksana) melakukan	inventarisasi hak negara atas pemanfaatan lahan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain	di dalam Kawasan Hutan
Partisipan: Aktor (elipsis)	Proses: Material	Partisipan: <i>Range/Scope</i>
		Sirkumstans: <i>Location (Place)</i>

Pada data klausa B.4, P.11, A.1 di atas, konfigurasi sistem transitivitas klausa adalah partisipan aktor elipsis = 'Pelaksana'; verba proses material = 'melakukan'; partisipan *Range/Scope* = 'inventarisasi hak negara atas pemanfaatan lahan...'; dan sirkumstan *location* = 'di dalam Kawasan Hutan'. Dalam konteks kritis, klausa ini berfungsi pada level dominasi; klausa mengobjektifikasi hutan sebagai sebuah inventarisasi 'hak negara'.

Agensi hutan tidak berada di posisi gramatikal sentral; karena yang dilakukan adalah aktivitas inventarisasi hak pemanfaatan, bukan pengakuan atau keberlanjutan relasi ekologis.

Tabel 7. Data B.1, P.1, A.2

<i>kawasan hutan</i>	<i>memproduksi</i>	<i>hasil hutan</i>
Partisipan: Aktor (Elipsis)	Proses: Material	Partisipan: Goal

Pada data klausa B.1, P.1, A.2 di atas, makna eksperiensial direalisasikan melalui proses material aktif 'memproduksi'. Verba tersebut merepresentasi sebuah aktifitas pada proses menciptakan atau memproduksi sesuatu, dan karena hal tersebut, verba memproduksi memiliki dua partisipan yang secara linear pasti terlibat yaitu aktor dan *goal*; 'kawasan hutan' pada klausa di atas berfungsi sebagai Aktor. *Goal* pada klausa di atas adalah frasa nomina 'hasil hutan' karena ia adalah entitas yang hadir sebagai 'hasil' dari verba material 'memproduksi'. Hutan memiliki agensi, namun agensi tersebut berada dalam logika komoditas atau *output* pada 'apa' yang bisa dihasilkan oleh hutan. Hutan tidak dipandang sebagai subjek ekologis yang memiliki kompleksitas ekosistem, dan berfungsi bagi dirinya sendiri. Hutan dinilai sebagai mesin produksi, yang nilainya ditakar dari apa yang ia hasilkan. Agensi memang terlihat pada klausa di atas, namun hutan direduksi menjadi instrumen penghasil komoditas.

Tabel 8. Data B.4, P.8, A.2

(Satgas)	<i>melaksanakan</i>	<i>penguasaan kembali</i>	<i>Di Kawasan Hutan</i>
Partisipan: Aktor (elipsis)	Proses: Material	Partisipan: Range/Scope	Sirkumstan: Location

Klausa data B.4, P.8, A.2 merealisasikan proses material aktif melalui verba 'melaksanakan, yang mengonstruksi tindakan konkret berupa pemulihan atau pengembalian kondisi entitas kawasan hutan ke keadaan semula. Nomina 'Satgas' pada struktur ini berfungsi sebagai aktor yang melakukan proses material aktif, namun direalisasikan secara pasif sehingga mengalami elipsis; meskipun tidak hadir secara eksplisit pada *surface structure* klausa, keberadaannya tetap fungsional. Nomina 'penguasaan kembali' berfungsi

sebagai *Range/Scope* karena ia menjelaskan domain dari verba 'melaksanakan', tidak secara langsung terdampak secara material sebagaimana partisipan Goal pada umumnya. Sementara itu, frasa preposisional 'di Kawasan Hutan' berfungsi sebagai Sirkumstan: *Location (Place)* yang mengindikasikan tempat dimana berlangsungnya proses material.

Secara kumulatif, ada pola yang cukup konsisten; aktor pemerintah atau institusional mendominasi atau menjadi entitas yang satu-satunya melakukan tindakan, proses didominasi oleh verba material yang bersifat intervensi secara administratif dan hukum, dan *Goal/Range* adalah ekstensi dari proses kontrol, penguasaan, penertiban, dan proses inventarisasi. Entitas hutan secara sistemik direpresentasikan sebatas sumber daya statis; ia adalah ruang dan objek yang mengalami tindakan, bukan sebagai partisipan yang independen yang memiliki kemampuan meregulasi diri melalui ekosistemnya sendiri. Secara diskursif, terdapat kekuasaan institusional yang diproduksi dan direproduksi melalui distribusi elemen-elemen transitif di dalam klausa.

2. Entitas Hutan dalam Struktur Frasa pada Perpres No.5/2025

Hal yang juga menonjol dari data adalah konstruksi leksem hutan di dalam bangunan frasa. Dalam banyak kemunculan, hutan tidak menjadi pusat atau inti frasa, namun nomina hutan muncul sebagai pewatas dalam frasa nominal yang cenderung bersifat administratif seperti 'penertiban', 'penguasaan', 'kawasan', 'pelaksanaan', 'pendanaan', 'perbaikan', 'penanganan', 'pemulihan', 'penagihan', dan 'pemanfaatan'. Pada penelitian ini, dalam fungsi pada level frasa, penulis menemukan leksem 'hutan' sebagai pewatas nomina sebanyak 13 kali, sebagai pewatas dalam verba yang dinominalisasi sebanyak 15 kali, sebagai pewatas dalam frasa preposisional sebanyak 11 kali, dan sebagai inti frasa sebanyak 9 kali.

Efek diskursif dari konstruksi frasa, terutama pada korpus adalah hutan hadir sebagai domain yang dikelola, bukan subjek yang kuat secara ekologis. Pola ini menunjukkan bahwa teks membangun entitas hutan ke dalam logika institusi,

hukum, dan ekonomi melalui frasa. Ketika hutan diberi label 'lindung' atau 'konservasi', pola tersebut menunjukkan relasi antara hutan dan manusia dalam konstruksi frasa. Pada label yang terlihat protektif seperti lindung dan konservasi, hutan tetap dikaitkan dengan fungsi bagi kehidupan manusia atau kepentingan institusi. Konstruksi ini adalah sebetulnya objektifikasi hutan dalam logika keberfungsian, pengontrolan, dibawah legitimasi hukum legal.

Secara struktural, hutan berulang kali menjadi pewatas dalam frasa nomina 'kawasan hutan', sehingga makna inti hutan sebagai leksem bergeser ke kawasan sebagai bagian dari wilayah administrasi, bukan ke hutan sebagai entitas ekosistem yang hidup. Berdasarkan konstruksinya, 'kawasan' menjadi inti atau kepala frasa, sehingga secara inheren fungsi ekologis hutan mengalami reduksi. Dapat dikatakan dominasi hadir dalam bentuk tata kelola wilayah atau ruang tertentu, yang secara berulang hadir dalam bentuk frasa nomina 'kawasan hutan'.

Pada level frasa, ketika hutan muncul sebagai *modifier* dalam frasa nomina seperti kawasan hutan, penertiban kawasan hutan, penguasaan hutan, pengelolaan kawasan hutan, dan pemanfaatan kawasan hutan, maka hutan ditegaskan sebagai kawasan administratif. Dalam konfigurasi seperti ini, yang menjadi pusat rujukan bukanlah hutan sebagai entitas ekologis, melainkan kawasan, penertiban, penguasaan, pengelolaan, atau pemanfaatan sebagai leksikon administrasi. Hutan hadir terutama sebagai domain yang dilekati, diklasifikasi, dan dimasukkan ke dalam logika regulatif negara. Dalam pola semacam ini, hutan juga tampil sebagai "sumber daya" bagi proses transitif dan verba yang dinominalisasi. Ia direlasikan terutama dengan tindakan penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan, penertiban, dan pemulihan, sehingga keberadaannya dibaca melalui apa yang dapat dilakukan atasnya. Dengan demikian, nominalisasi tidak hanya mengaburkan aktor, tetapi juga menggeser hutan ke posisi sumber daya yang tersedia bagi operasi administratif dan ekonomi.

Niu (2023) menemukan bahwa entitas non-manusia sebenarnya dapat direpresentasikan sebagai entitas yang otonom

dan memiliki kemampuan untuk meregulasi dirinya sendiri, bukan sebagai tujuan yang pasif. Dengan demikian, ketika hutan dalam korpus ini lebih sering hadir sebagai pewatas, domain administratif, dan sumber daya bagi verba yang dinominalisasi, teks semakin menjauh dari representasi ekologis yang mengakui agensi hutan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi pengalaman dalam klausa-klausa berleksem hutan pada Perpres No. 5/2025 didominasi oleh proses material, dan disusul oleh proses relasional dan verbal. Dominasi ini memperlihatkan bahwa pengalaman yang dibangun teks adalah pengalaman tindakan kontrol secara institusional terhadap hutan, bukan pengalaman relasional ekologi dan institusi yang menempatkan hutan sebagai subjek yang aktif. Analisis pada korpus menguatkan orientasi spasial-administratif dalam kontrol dan pengelolaan hutan. Sistem transitivitas dalam korpus cenderung meringkai hutan sebagai objek tata kelola, bukan sebagai entitas hidup yang beragensis.

Secara kumulatif, agensi manusia atau institusi hadir secara dominan sebagai pusat tindakan dan legitimasi, sedangkan hutan muncul sebagai entitas yang dikenai tindakan, diklasifikasi, atau dikelola dalam konteks aset dan kawasan. Pada level frasa, kecenderungan hutan sebagai pewatas (bukan inti frasa) mempertegas subordinasi leksikogramatikal; hutan dikonstruksi terutama sebagai domain kebijakan, kawasan, penguasaan, penertiban, pendanaan, bukan sebagai subjek ekologis. Konsekuensinya, teks memperlihatkan pola eko-ambivalen, bahwa retorika perlindungan hadir, namun struktur transitivitas tetap mempertahankan logika antroposentris-instrumental.

Secara teoretis, penelitian ini menekankan bahwa analisis transitivitas dapat membuka dimensi ideologis teks yang sering kali tersembunyi di balik format teks yang legal dan normatif, yakni teks yang disusun secara formal, impersonal, preskriptif, dan tampak netral karena berlandaskan otoritas hukum. Karakter inilah yang sering membuat pilihan-pilihan gramatikal di dalam teks hukum tampak alamiah, padahal teks membawa sudut pandang ideologis tertentu. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan

perlunya pembacaan kembali pada teks kebijakan, agar teks bergerak menuju teks yang lebih mengakui agensi ekologis, relasi timbal balik manusia dengan alam, dan penguatan nilai intrinsik hutan di luar fungsi ekonominya.

Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pada bahasa kebijakan bukan sekadar pada persoalan stilistika, melainkan persoalan tentang bagaimana cara kita “membangkai” alam. Selama hutan hanya direpresentasikan sebagai aset, fungsi ekonomi, tata kelola, dan penguasaan administratif, maka nilai intrinsiknya sebagai entitas ekologis akan selalu terpinggirkan. Karena itu, teks kebijakan perlu bergerak menuju representasi yang tidak hanya menekankan manfaat hutan bagi manusia, namun juga mengakui keberadaan hutan sebagai entitas hidup yang memiliki nilai pada dirinya sendiri (nilai intrinsik), di luar logika pemanfaatan dan kepentingan ekonomi.

B. Saran

Pertama, penelitian lanjutan disarankan memperluas korpus penelitian. Kedua, pendekatan analisis dapat diperdalam dengan menggabungkan metafungsi ideasional dan metafungsi interpersonal dan tekstual, termasuk analisis modalitas, evaluasi, dan strategi legitimasi, sehingga kritik ideologis terhadap bahasa hukum menjadi lebih dalam. Ketiga, pada level metodologis, studi berikutnya dapat menerapkan perbandingan secara diakronik dan sinkronik, untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak pada konstruksi agensi ekologis antarperiode. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar penyusunan panduan bahasa kebijakan yang bersifat ekologis, agar perangkat hukum tidak hanya efektif secara administratif, namun juga adil secara ekologis.

DAFTAR RUJUKAN

- Acha, W. A. (2022). An ecocritical discourse analysis of anthropocentrism in the Cameroon press. *International Journal of Humanity Studies*, 5(2), 120–140. <https://doi.org/10.24071/ijhs.v5i2.4202>.
- Bar-On, Y. M., Phillips, R., & Milo, R. (2018). The biomass distribution on Earth. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115(25), 6506–6511. <https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115>.
- Barrett, L. F. (2017). *How emotions are made: The secret life of the brain*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Dörnyei, Z. (2007). *Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies*. Oxford University Press.
- Elhacham, E., Ben-Uri, L., Grozovski, J., Bar-On, Y. M., & Milo, R. (2020). Global human-made mass exceeds all living biomass. *Nature*, 588(7838), 442–444. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-3010-5>.
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Ferber, A. L. (2007). Whiteness studies and the erasure of gender. *Sociology Compass*, 1(1), 265–282. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2007.00014.x>.
- Fill, A., & Mühlhäusler, P. (Eds.). (2001). *The ecolinguistics reader: Language, ecology and environment*. Continuum.
- Gee, J. P. (2006). *An introduction to discourse analysis: Theory and method* (2nd ed.). Routledge.
- Gong, H., & Liu, L. (2018). Ecological discourse analysis of an UN environmental story in terms of transitivity process. *Advances in Language and Literary Studies*, 9(3), 67–77. <https://doi.org/10.7575/aiac.all.v.9n.3p.67>.
- Halliday, M. A. K. (2001). New ways of meaning: The challenge to applied linguistics. In A. Fill & P. Mühlhäusler (Eds.), *The ecolinguistics reader: Language, ecology and environment* (pp. 175–202). Continuum.
- Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. I. M. (2014). *Halliday's introduction to functional grammar* (4th ed.). Routledge.
- Haritsyah, Y., Sawirman, S., & Zulprianto, Z. (2024). A systemic functional linguistic analysis of mood structures in news coverage of Anies Baswedan's speech during presidential election debates in The Jakarta Post and TEMPO.CO. *Jurnal Sosial*

- Ekonomi dan Humaniora, 10(3), 436–445.
<https://doi.org/10.29303/jseh.v10i3.659>
- Hart, C., & Cap, P. (Eds.). (2014). *Contemporary critical discourse studies*. Bloomsbury Academic.
- Hynes, M. (2016). Bowers, C. A. (2014). The false promises of the digital revolution: How computers transform education, work, and international development in ways that are ecologically unsustainable. *Irish Journal of Sociology*, 25(1), 86–88.
<https://doi.org/10.1177/0791603516632226>.
- Karisa, A., & Lauwren, S. (2020). A transitivity analysis of Greta Thunberg's 2019 Climate Action Summit speech. *Celtic: A Journal of Culture, English Language Teaching, Literature and Linguistics*, 7(2), 191–198.
<https://doi.org/10.22219/celtic.v7i2.14290>.
- Kingsnorth, P., & Hine, D. (2009). *Uncivilisation: The dark mountain manifesto [Manifesto]*. Dark Mountain. Retrieved September 18, 2025, from <https://darkmountain.net/about/manifesto/>.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). *Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought*. Basic Books.
- Law, L., & Matthiessen, C. M. I. M. (2023). Revisiting Halliday (1990) 'New ways of meaning: The challenge to applied linguistics': What has changed and what still needs to be done? *Linguistics and the Human Sciences*, 15(3), 337–368.
<https://doi.org/10.1558/lhs.23599>.
- Light, A., & Rolston, H., III (Eds.). (2002). *Environmental ethics: An anthology*. Wiley-Blackwell.
- Lockwood, R. (2024). Anthropomorphism and anthropocentrism in the Anthropocene. In A. H. Fine, M. K. Mueller, Z. Y. Ng, A. M. Beck, & J. M. Peralta (Eds.), *The Routledge international handbook of human-animal interactions and anthrozoology* (pp. 93–108). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781032153346-7>.
- Niu, F. (2023). An ecological discourse analysis of Faulkner's *The Bear* from the perspective of transitivity system. *Academic Journal of Humanities & Social Sciences*, 6(2), 48–52.
<https://doi.org/10.25236/AJHSS.2023.060209>.
- Plumwood, V. (2002). *Environmental culture: The ecological crisis of reason*. Routledge.
- Rogers, R. (2003). *A critical discourse analysis of family literacy practices: Power in and out of print*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Rymes, B. (2009). *Classroom discourse analysis: A tool for critical reflection*. Hampton Press.
- Sinaga, H., Kalo, S., Runtung, & Suhaidi. (2017). Legal disharmony in Indonesia. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22(3), 112–116.
<https://doi.org/10.9790/0837-220304112116>.
- Stibbe, A. (2021). *Ecolinguistics: Language, ecology and the stories we live by* (2nd ed.). Routledge.
- Waters, C. N., Zalasiewicz, J., Summerhayes, C., Barnosky, A. D., Poirier, C., Gałuszka, A., Wolfe, A. P. (2016). The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene. *Science*, 351(6269), aad2622.
<https://doi.org/10.1126/science.aad2622>.
- Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2001). *Methods of critical discourse analysis*. SAGE Publications.
- Yahya, M., & Roselani, N. G. A. (2024). Representations of human domination in climate policy documents: A transitivity analysis. *Issues in Applied Linguistics & Language Teaching*, 6(1), 131–145.
<https://doi.org/10.37253/ialltech.v6i1.9307>.
- Zhu, R. (2024). Grammatical mechanism in environmental discourse: An ecolinguistics study of voice, nominalization and metaphor. *Journal of Linguistics and Communication Studies*, 3(3), 53–58.
<https://doi.org/10.56397/JLCS.2024.09.07>
- Zulprianto, et al. (2023). Analyzing the experiential meanings of survivors' expressions of natural disasters in Indonesia.

E3S Web Conf. 464 16001.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346416001>

Zulprianto & Fanany, R. (2023). Exploring the experiential meanings of the COVID-19 survivors' expressions. *Studies in English Language and Education*, 10(3), 1485-1500.
<https://doi.org/10.24815/siele.v10i3.29502>